

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN JEPANG DENGAN AMERIKA SERIKAT

Jepang dan Amerika Serikat pada dasarnya telah memiliki hubungan kekerabatan jauh sebelum Perang Dunia II. Amerika Serikat tidak hanya pernah berusaha untuk menduduki Jepang saat kemenangan Sekutu pada tahun 1945, akan tetapi upaya yang serupa pernah dilakukan sebelum era Restorasi Meiji. Namun upaya untuk menduduki Jepang tidak dapat digambarkan dengan peristiwa yang statis. Dalam sejarah hubungan keduanya Jepang tidak serta merta hanya berperan sebagai negara yang defensif terhadap kebijakan Amerika Serikat, namun juga seringkali bertindak ofensif untuk melawan kecurangan yang dilakukan Amerika Serikat. Dinamika hubungan keduanya akan dijelaskan melalui empat periode berikut, yaitu periode modernisasi Jepang di bawah Comodor Perry tahun 1853- 1890, periode ekspansionisme Jepang tahun 1890- 1945, periode Perang Dingin, dan periode pasca Perang Dingin yang terdiri dari kerja sama keamanan serta ekonomi antara Jepang dengan Amerika Serikat.

A. Periode Modernisasi Jepang di bawah Comodor Perry Tahun 1853- 1890

Jepang pada awalnya memiliki kekuasaan tertinggi di bawah kekaisaran Tenno Heika yang menurut kepercayaan merupakan keturunan langsung Dewi Matahari *Amaterasu-Omi-kami*, dengan kepemilikan kekuasaan duniawi pemerintahan dan spiritual (Tjeng, 1983, hlm. 347). Namun sejak abad ke- 12 hingga abad ke- 19 berganti menjadi era feodalisme militer di bawah kewenangan *Shogun* (jenderal). Pada tahun 1600, *shogun* pertama yang memegang kekuasaan Jepang secara *de facto* berasal dari keluarga Tokugawa yang pada saat itu berkedudukan di Tokyo (Tjeng, 1983, hlm. 356). *Shogun* Tokugawa memandang politik *sakoku*, yaitu politik luar negeri untuk tidak terlibat aktif dalam hubungan internasional, sebagai sikap yang ideal dalam memberikan kemakmuran bagi masyarakat Jepang (Tjeng, 1983, hlm 356).

Pada era tersebut hanya beberapa negara saja yang diperbolehkan untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan Jepang, yaitu negara Tiongkok dan Belanda, dalam waktu dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

Sedangkan kondisi negara- negara Benua Eropa dan Amerika pada saat itu sangat membutuhkan bahan baku mentah dan pasaran untuk industri mereka, akibat dari era modern praktis yang dilatarbelakangi oleh aktivitas Eropa Barat untuk membuktikan teori bumi bulat. Kegiatan ekspedisi ini kemudian tiba hingga wilayah terjauh dari Eropa, yang disebut dengan Timur Jauh merujuk pada Tiongkok, Korea, dan Jepang. Dengan pertimbangan keberhasilan ekspansionisme negara Barat yang telah menguasai banyak negara di Asia seperti India dan Asia Tenggara, maka terjadilah krisis politik dalam negeri Jepang untuk menindaklanjuti tawaran modernisasi pada tahun 1853 (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 69).

Di bawah komando Comodor Matthew Perry dari Amerika Serikat, Jepang akhirnya melakukan hubungan diplomatik berupa perdagangan bebas pertama yang dikenal dengan Restorasi Meiji pada tahun 1868, setelah berabad-abad mengalami politik isolasionisme *self sufficiency* (Tjeng, 1983, hlm. 348). Restorasi Meiji tidak hanya menandakan adanya modernisasi khususnya industrialisasi pertama oleh Jepang, akan tetapi juga sebagai simbol dari pengembalian kekuasaan kepada Kekaisaran Tenno Heika. Ancaman militer Amerika Serikat kepada Jepang untuk membuka negaranya terhadap perdagangan internasional menimbulkan krisis nasional berupa kubu masyarakat yang pro dan kontra terhadap internasionalisme.

Masyarakat Jepang cenderung mendukung pemerintahan di bawah kekaisaran Tenno Heika untuk merealisasikan kebijakan modernisasi yang dinilai sangat visioner dikarenakan mampu beradaptasi dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah Comodor Perry memiliki pencitraan yang karismatik dan kekuatan superior terutama dengan keunggulan persenjataan api dan kapal- kapal besi (*black ship*) yang memikat

masyarakat Jepang (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 69). Mereka beranggapan bahwa keputusan untuk bekerja sama jauh lebih tepat jika dibandingkan dengan mempertahankan kebijakan isolasionisme dan berakhir seperti negara Asia lainnya yang mengalami penjajahan di bawah tekanan militer.

Restorasi Meiji memberikan pengaruh yang sangat besar tidak hanya bagi politik luar negeri tapi juga dalam negeri Jepang, terutama perkembangan pola pikir dan pembangunan masyarakatnya. Dalam kurun waktu selama hampir enam puluh tahun lamanya, Amerika Serikat telah melakukan kontrol terhadap kebijakan luar negeri ekonomi dan politik Jepang. Di bawah bimbingan Comodor Perry, Jepang dilatih untuk membuka perdagangan terhadap negara Barat melalui tarif tetap yang rendah dan perjanjian sesuai dengan kebijakan nasional negara Barat. Walaupun pada awalnya praktik perdagangan ini tidaklah adil, namun masyarakat Jepang merasakan ada metode baru dalam pembangunan ekonomi mereka, terutama sejak tahun 1890- an dimana Amerika Serikat bersama aliansinya mulai fokus terhadap persiapan Perang Dunia I.

Permintaan dari negara Barat terhadap konsumsi industri Jepang kemudian berubah menjadi konsumsi perang pada saat itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, sistem perdagangan yang diterapkan Jepang mengalami pembelajaran dan tumbuh menjadi negara industri maju di Asia Timur. Jepang kemudian mendirikan sejumlah pabrik dan dok perkapalan yang dikenal dengan *zaibatsu*, untuk kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hasil produksi negara Barat (Tjeng, 1983, hlm. 357). Sehingga pada periode ini selain berhasil memanfaatkan ancaman militer dari Amerika Serikat menjadi titik tolak untuk melakukan modernisasi ekonomi, Jepang juga berhasil memiliki basis yang kuat di sejumlah negara kawasan Asia dan memiliki modal yang cukup untuk kemudian melakukan ekspansi pertama yang dilakukan oleh bangsa Asia.

B. Periode Ekspansionisme Jepang Tahun 1890-1945

Dimulai sejak Restorasi Meiji hingga kurang lebih dua puluh lima tahun setelahnya, Jepang memfokuskan dirinya dalam pembangunan industri dan tidak terlibat dalam politik luar negeri aktif. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Jepang secara langsung acuh dengan perkembangan internasional yang sangat marak dengan politik kekuasaan dan ekspansi wilayah, bahkan setelah berlakunya Perjanjian Damai Westphalia tahun 1648. Keinginan Jepang untuk menguasai daerah Asia didasari pada pandangannya untuk melepaskan negara Asia lainnya dari pengaruh kolonialisme Barat, yang dikenal dengan nilai *Azia Shugi* (Shilliam, 2014, hlm. 226). Sasaran *Azia Shugi* adalah negara Korea yang merupakan daerah paling terdekat dari Jepang dan Manchuria yang merupakan wilayah Asia Timur paling subur.

Namun keinginan tersebut menuntun Jepang untuk mengambil tindakan koersif kepada Tiongkok dan Rusia yang pada saat itu keduanya merupakan negara yang memiliki daerah kekuasaan terhadap Korea dan Manchuria. Korea masih merupakan wilayah kebudayaan Tiongkok dan dianggap sebagai wilayah taklukan atau dikenal dengan *vassal state* (Tjeng, 1983, hlm. 358). Keinginan Jepang ini sebenarnya telah ada dari masa pengendalian Commodore Perry berupa pembentukan pasukan ekspedisi Korea pada tahun 1873 yang memiliki slogan *Seikanron* berisikan pendapat penaklukan Korea (Tjeng, 1983, hlm. 359). Akan tetapi mengingat persiapan angkatan perang yang masih belum cukup modern, maka pada tahun 1894-1895 Jepang menyerang angkatan laut Tiongkok. Ekspansi ini berhasil dimenangkan dengan pernyataan Tiongkok yang mengakui Korea sebagai negara merdeka dan menyerahkan pulau Taiwan serta semenanjung Liaotung wilayah Manchuria kepada Jepang melalui kesepakatan *Treaty of Shimonoseki* (Tjeng, 1983, hlm. 359-360).

Kemenangan atas wilayah ujung selatan Manchuria itu membuat Jepang kemudian membangun kekuasaannya. Akan

tetapi kebutuhan Rusia terhadap wilayah tersebut sebagai pelabuhan pada musim dingin (*warm-water-ports*), memaksanya untuk meminta Jepang menyerahkan daerah kekuasaan semenanjung Liaotung kepada Rusia melalui praktik '*tripartite intervention*' pada tahun 1851 dengan memberi biaya ganti rugi sebesar 30 juta tael atau setara dengan 450 juta yen (Tjeng, 1983, hlm. 360). Menurut Jepang permintaan ini merupakan penghinaan bagi negaranya yang kemudian ditanggapi dengan penyerangan terhadap angkatan laut Rusia pada tahun 1904-1905 dan berakhir dengan kemenangan telak walaupun pada saat itu Rusia didampingi Jerman dan Perancis.

Lalu setelah kemenangan sekutu pada Perang Dunia I tahun 1917, Jepang yang memihak negara sekutu memanfaatkan momentum tersebut untuk mengajukan Dua Puluh Satu Permintaan (*Twenty-one Demands*) hak istimewa kepada Tiongkok, diantaranya adalah permintaan penempatan posisi penasehat Jepang dalam segala pengambilan kebijakan Tiongkok (Tjeng, 1983, hlm. 361). Sehingga pada tahun 1937 Jepang berhasil menguasai kota-kota besar dan pantai Tiongkok. Keberhasilan ini tidak memberikan kepuasan pada Jepang karena masih membutuhkan sumber daya alam dari Asia Tenggara akibat ketiadaannya kekuasaan pada daerah bagian dalam Tiongkok.

Pertumbuhan Jepang yang sangat signifikan ini menarik perhatian Amerika Serikat dan Inggris yang pada tahun 1921-1922 melakukan tawaran pembagian kekuasaan dengan perbandingan 5:5:3 untuk wilayah lautan Pasifik dan Atlantik dalam Perjanjian Washington (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 70). Akan tetapi ketika Jepang mulai memberikan pengaruhnya hingga kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat malah melanggar Perjanjian Washington dengan memberikan sanksi ekonomi bersama Kanada, Inggris, dan Belanda berupa embargo suplai minyak dan bahan baku mentah yang diperlukan Jepang untuk perang (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 71). Dengan membentuk aliansi bersama Jerman dan Italia, Jepang melancarkan serangan terhadap angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tahun 1941 sebagai aksi

protesnya terhadap sanksi ekonomi tersebut (Tjeng, 1983, hlm. 362). Tidak sama dengan kemenangan atas Tiongkok, Korea, dan Manchuria, Jepang harus menerima sanksi internasional berupa kepemilikan militer non aktif dan kependudukan oleh Amerika Serikat pasca kekalahannya pada Perang Dunia II tahun 1945.

C. Periode Perang Dingin

Jepang harus menerima kekalahan pada Perang Dunia II dengan menyetujui Deklarasi Postdam tahun 1945, untuk kemudian dimasukkan dalam perumusan Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang berisikan ketersediaan Jepang untuk melucuti Angkatan Darat dan Laut Kekaisarannya (Takashi & Jain, 2000, hlm. 137). Hal ini juga menandakan bahwa Jepang menerima keputusan untuk diberikan proteksi keamanan penuh dan patuh pada kependudukan Amerika Serikat di bawah jenderal Mc Arthur selama enam tahun. Kependudukan tersebut berlangsung hingga pada tahun 1951 terjadi kesepakatan dalam Perjanjian Damai San Francisco (*San Francisco Peace Treaty*), dimana Jepang mendapatkan kemerdekaannya kembali dengan syarat tidak melaksanakan agresi militer dan bersedia beberapa wilayah miliknya dibangun pangkalan Amerika Serikat (Tjeng, 1983, hlm. 363). Keputusan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menahan pengaruh komunisme dan menjadikan Jepang sebagai negara aliansi utamanya di Asia, dikarenakan pada tahun 1949 sudah dimulainya Perang Dingin berupa perimbangan kekuatan antara sosialis komunis oleh Uni Soviet dan liberal kapitalis oleh Amerika Serikat. Perang Dingin diawali oleh kemunculan China komunis pada tahun 1949 dan pecahnya Perang Korea tahun 1950 di Asia, serta pembentukan *The North Atlantic Treaty Organizations* (NATO) di Eropa (Takashi & Jain, 2000, hlm. 178).

Jepang tumbuh sebagai aliansi Amerika Serikat yang sangat tertutup jika dibandingkan dengan Australia dan Korea. Berbeda dengan aliansi Amerika Serikat yang lain, Jepang dipersiapkan untuk lebih berkontribusi dalam politik

domestiknya dan ikut berperang jika terdapat ancaman yang datang langsung menuju wilayah Jepang. Walaupun sudah dinyatakan kembali merdeka, namun Jepang masih dikendalikan oleh Amerika Serikat dengan motif bantuan dan bimbingan terhadap aliansi baru, berupa reformasi politik domestik, rekonstruksi ekonomi, dan rehabilitasi pandangan politik internasional (Takashi & Jain, 2000, hlm. 178).

Usaha pembangunan kekuatan militer yang kuat oleh sejumlah tokoh nasionalis Jepang juga tidak lagi dapat dilakukan dikarenakan terlalu banyak pengawasan dan tekanan dari Amerika Serikat untuk menghalangi kemungkinan bangkitnya angkatan bersenjata masif Jepang pada masa Perang Dunia II. Maka untuk membentuk pertahanan nasional, Jepang hanya diizinkan untuk membangun *Self Defense Force* (SDF) yang juga bekerja sama dengan pertahanan Amerika Serikat (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 72). Status Jepang pada saat itu dijadikan sebagai basis pengawasan bagi kawasan Asia Timur dari berbagai ancaman dan serangan bersenjata tentara komunisme.

Untuk lebih menanamkan pengaruh paham liberal komunis kepada masyarakat Jepang, Amerika Serikat mengumpulkan tokoh nasionalis pro pemerintahan Amerika Serikat untuk membentuk partai *Liberal Democratic Party* (LDP) pada tahun 1955 untuk menghalangi komunitas berhaluan kiri dan pebisnis dari pengaruh Uni Soviet dan China. Pembentukan partai tersebut tetap diawasi oleh Amerika Serikat untuk selalu mendominasi pemerintahan Jepang, sehingga kebijakan politik Jepang sangat tipikal yang bercirikan pada tiga hal yaitu pro Amerika Serikat, pro kebijakan kapitalis, dan minimalisasi persenjataan bagi pertahanan nasional (Takashi & Jain, 2000, hlm. 178).

Segala bentuk keterbatasan ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk fokus membangun sektor perekonomiannya pada tahun 1960-an ketika sektor pertahanan dijamin oleh Amerika Serikat. Akan tetapi usaha ini kemudian terhambat dikarenakan adanya pengalokasian dana cukup besar terhadap masalah lingkungan berupa *minamata's tragedy* pada tahun 1970-an yang

menyebabkan keracunan merkuri pada masyarakat di daerah Minamata akibat pembuangan limbah pabrik yang tidak mementingkan aspek *sustainability environment* (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 73). Melihat fenomena tersebut, Amerika Serikat mengambil langkah perubahan berupa kebijakan *free trade* kepada aliansi- aliansinya termasuk Jepang yang diperbolehkan untuk mengadakan perluasan pasar dengan berbagai negara yang menganut liberal kapitalis.

Kebijakan tersebut mampu membangkitkan perekonomian Jepang terutama setelah mengadakan hubungan dagang dengan Asia Tenggara untuk memenuhi bahan baku mentah yang murah dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar produk. Namun Amerika Serikat kembali melaksanakan kebijakan penaikan tarif untuk setiap barang yang masuk ke Amerika Serikat dari berbagai negara, termasuk Jepang. Tidak hanya kebijakan pemberlakuan kenaikan pajak, Amerika Serikat juga mulai mengadakan perdagangan dan kerja sama intensif di bidang lain dengan China untuk membendung pengaruh Uni Soviet, sehingga Jepang pada saat itu mendapatkan berbagai kerugian seperti pemberlakuan pajak ekspor tambahan dan pengurangan anggaran keamanan dari Amerika Serikat melalui Nixon Doctrine (Takashi & Jain, 2000, hlm. 179).

Pada paruh kedua era Perang Dingin, Amerika Serikat mengalami penurunan sektor ekonomi yang cukup parah akibat krisis minyak tahun 1973-1974 dan kekalahannya dalam Perang Vietnam tahun 1975, bahkan mengakibatkan perselisihan kerja sama ekspor dengan Jepang dan aliansi NATO (Takashi & Jain, 2000, hlm. 179). Perselisihan ini mengarahkan pemerintah Amerika Serikat pada hutang dan defisit keuangan yang semakin membesar pada tahun 1983, bahkan hingga pembatasan ekspor sejumlah produk dari Jepang berupa tekstil, baja, elektronik, dan industri mobil (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 74). Harga jual bagi investasi di Amerika Serikat menjadi jauh lebih murah jika dibandingkan dengan berinvestasi di Jepang. Melihat kesempatan ini Jepang pun mulai membeli beberapa perusahaan besar Amerika Serikat, yang didapatkan melalui

tabungan pribadi *big companies* dari usaha investasi asing dan *real estate* (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 74).

Sejak saat itu Jepang menjadi tidak hanya melakukan perluasan perdagangan dan kerja sama dengan sejumlah negara, namun juga sering mengadakan investasi langsung dalam pembangunan industri. Perkembangan signifikan terutama dalam modernisasi sekaligus industrialisasi oleh Jepang semakin menarik perhatian dunia, bahkan mendapat penilaian negatif dari masyarakat internasional sebagai makhluk ekonomi yang hanya memakmurkan negara sendiri tanpa ikut andil secara aktif dalam pergaulan politik internasional, hingga pemberitaan media internasional menyatakan kebijakan ekonomi Jepang sebagai ancaman ekonomi dunia '*Japanese economic threat*' (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 74). Untuk menetralsir citra negatifnya di dunia, Jepang kemudian mendirikan *The Japan Foundation* sebagai upaya pertukaran kebudayaan dan kultur agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kebijakan *checkbook diplomacy* Jepang dengan negara mitra bisnisnya di kemudian hari (Yanti, 2012, hlm. 6).

D. Periode Pasca Perang Dingin

Selama kurang lebih empat puluh tahun lamanya Perang Dingin berlangsung, Jepang dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang relatif dinamis. Ketidakstabilan hubungan keduanya sering diakibatkan oleh perubahan situasi selama perang ideologi antara liberal kapitalis dan sosial komunis. Akan tetapi setelah Uni Soviet memecahkan diri menjadi negara-negara baru di bagian Eropa Timur dan China menjalankan dua ideologinya di bawah pemerintahan Mao Zedong, hubungan keamanan dan ekonomi Amerika Serikat dan Jepang tampak mulai menemui babak baru. Perumusan kerjasama di kedua sektor mulai tidak lagi didasari pada koalisi yang dipaksakan, namun lebih kepada hak prerogatif negara sebagai kesatuan yang merdeka. Berikut merupakan pemaparan tindak lanjut dari kerjasama keduanya yang sudah dibangun sejak era Perang Dingin berlangsung:

1. Kerja Sama Keamanan Jepang dengan Amerika Serikat

Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 telah memberikan karakter baru bagi keamanan global, terutama setelah munculnya negara-negara pecahan Uni Soviet yang menjalin kerjasama tanpa adanya intensi penyebaran ideologi, dengan berbagai negara di belahan dunia. Setiap aliansi maupun pakta pertahanan yang sudah tidak relevan dengan globalisasi, seperti *Southeast Asia Treaty Organisation* (SEATO) dan *Central East Treaty Organisation* (CENTO), telah dibubarkan secara perlahan. Begitu juga halnya dengan praktik pengembangan nuklir dengan tujuan perimbangan kekuasaan mulai dikurangi akibat keterbatasan anggaran. Jepang dan Amerika Serikat memulai kerja sama dalam tingkatan baru yang sudah memiliki pemahaman ideologi bersama untuk lebih menghormati satu sama lain sebagai kesatuan negara bangsa dan memikirkan strategi kedepan dalam memenuhi kebutuhan keamanannya.

Demi memperlihatkan komitmen dalam menjaga stabilitas Jepang dan kawasan Asia, hingga abad 21 Amerika Serikat tetap menempatkan kapal induk, pesawat tempur, dan landasan udara khusus di berbagai wilayah strategis, seperti di Pulau Okinawa (Takenaka, 2016). Penempatan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana Amerika Serikat memiliki perpanjangan pengaruh untuk melakukan intervensi di wilayah strategis dengan penghematan anggaran. Begitu pula dengan Jepang yang tidak perlu terlalu menganggarkan dana untuk keamanan karena SDF juga bekerjasama dengan angkatan militer Amerika Serikat dan sekaligus mampu membuktikan kepada dunia internasional, bahwa Jepang juga turut aktif memberikan kontribusi nyata bagi pergaulan politik internasional (Takashi & Jain, 2000, hlm. 139). Hal ini dikarenakan keputusan perpanjangan kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang juga memberikan ruang bagi Jepang untuk ikut turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian tidak hanya

pada skala domestik dan regional saja, akan tetapi meluas hingga global.

Namun persetujuan Jepang untuk memperpanjang kerja sama di bidang keamanan dengan Amerika Serikat tidaklah diikuti dengan penambahan maupun pembelian peralatan militer baik berupa persenjataan maupun kapal pertahanan. Anggaran dana untuk sektor keamanan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan lebih dialokasikan untuk pelatihan SDF nya (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 75). Jepang tidak akan membangun angkatan bersenjata yang ofensif seperti era Perang Dingin dan lebih memperhatikan kualitas hidup para tantama Angkatan Darat Bela Diri Jepang (*Japan Ground Self Defense Force*) yang pada saat itu jumlah usia produktifnya semakin berkurang. Jepang juga memberikan pernyataan tegas untuk penolakannya terhadap pemakaian nuklir dalam negeri dan mengecam setiap negara yang memberlakukan kebijakan nasional dalam pengembangan nuklir dengan tujuan perang maupun pertahanan (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 75).

Walaupun kebijakan keamanan Jepang yang lebih defensif membuat Amerika Serikat kehilangan pasar dagang produk persenjataan dan perlengkapan militer lainnya, dan membuat kebutuhan mendasar seperti sistem pengendalian pesawat dikenakan biaya penjualan hingga dua kali lipat dari sebelumnya, akan tetapi pada dasarnya hubungan keamanan keduanya tetap berjalan hingga saat ini. Jepang memutuskan untuk tetap mempertahankan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dan membuka peluang bagi kemungkinan kooperasi pertahanan multilateral, dengan maksud untuk menambah nilai kerja sama pertahanan dan bukan dimaknai sebagai pengganti.

2. Kerja Sama Ekonomi Jepang dengan Amerika Serikat

Kerja sama ekonomi Amerika Serikat dengan Jepang memang diwarnai oleh harmonisasi pada awal era Perang Dingin dan berakhir pada perselisihan ekonomi di akhir 1989,

namun praktik ekonomi keduanya setelah Perang Dingin justru semakin terintegrasi terutama dalam kemitraan ekonomi global. Pertumbuhan dalam kerja sama ekonomi diantara keduanya ditandai dengan adanya pertukaran ketenagakerjaan. Setiap pekerja Amerika Serikat yang diimpor ke Jepang mendapati pengawasan penuh oleh kepala perusahaan industri, karena hal tersebut merupakan kebijakan dari Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (*Ministry of International Trade and Industry*) yang juga disepakati oleh para Kelompok Bisnis Jepang agar tidak terjadi dominansi ketenagakerjaan asing (Takashi & Jain, 2000, hlm. 140).

Sedangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an dituntut untuk memberikan pernyataan dan perubahan sikap terkait pengenaan tarif tambahan bagi perusahaan asing yang beroperasi (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 78). Praktik ini dinilai sebagai salah satu bentuk perdagangan yang tidak adil dan mendapat protes keras dari negara-negara aliansinya, termasuk Jepang dan Kawasan Eropa. Salah satu pimpinan dari Kelompok Bisnis Jepang, Akio Morita yang merupakan *founder* sekaligus CEO *Sony Corporation*, mendesak Amerika Serikat untuk lebih memperhatikan industri manufaktur dan menarik investasinya dari Jepang jika kebijakannya hanya mementingkan keuntungan pribadi semata (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 79).

Kemudian setelah mengalami beberapa negosiasi dan perumusan ulang dalam perjanjian kerja sama, Jepang dan Amerika Serikat membuka kembali hubungan ekonomi yang lebih kooperatif. Pada tahun 1992 perusahaan mobil Amerika Serikat *Ford* mulai membuka pasarnya hingga ke Eropa dan Jepang. Perusahaan elektronik *Apple Computer Inc.* juga melakukan kerja sama berupa pengembangan produk di Jepang dikarenakan adanya potensi keahlian manufaktur yang unggul dan modal investasi dari perusahaan elektronik Jepang (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 79). Amerika Serikat bahkan mendapatkan pasar hingga 20% dari Jepang dikarenakan keberhasilannya dalam mencapai produksi mikrochip paling populer pada tahun 1992 dan menginspirasi perusahaan elektronik Jepang untuk membuat inovasi dalam produknya

agar sesuai dengan keinginan pasar (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 79).

Akan tetapi setelah mendapatkan kemitraan dengan Amerika Serikat dalam pembagian pasar dan ide terkait inovasi produk, Jepang kemudian pada tahun 1992 akhir mengalami ketidakstabilan pasar akibat meningkatnya produsen untuk produk yang sama dan sektor pasar yang menurun akibat harga produk ekspor dan manufaktur Jepang yang mahal (Takashi & Jain, 2000, hlm. 159). Kerugian ini merupakan efek jangka panjang dari hasil Perjanjian Plaza pada tahun 1985 yang mengeluarkan keputusan untuk depresiasi nilai dollar AS terhadap yen Jepang dan deutsche mark Jerman.

Perjanjian Plaza merupakan kesepakatan antara menteri keuangan dan bank sentral Prancis, Jepang, Jerman Barat, dan Britania Raya, dan Amerika Serikat melalui intervensi di bursa valuta asing, yang kemudian menyebabkan gelembung ekonomi di Jepang setahun setelahnya hingga tahun 2000 (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 82). Gelembung ekonomi merupakan sebuah fenomena tingginya harga saham dan tanah dalam pasar real estat yang menyebabkan meningkatnya minat masyarakat domestik untuk berinvestasi dan mengakibatkan besarnya nominal pinjaman bank (Takashi & Jain, 2000, hlm. 160). Oleh karena itu Jepang mengadakan perbaikan manajemen dalam negeri, terutama dari evaluasi permintaan kebutuhan masyarakat dalam negeri.

Dalam perkembangannya, Amerika Serikat memperkuat hubungan diantara perusahaan keduanya di berbagai bidang, seperti kerja sama baja melalui koordinasi National Intergroup- *Nippon Kokan*, perusahaan mobil GM-Toyota, dan elektronik Motorola-Toshiba (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 82). Begitu juga halnya dengan hubungan keduanya di kawasan Asia Pasifik untuk membentuk stabilitas dan perdamaian melalui integrasi ekonomi. Walaupun dalam perkembangannya Jepang tidak terlalu aktif dalam kerja sama kawasan, akan tetapi Jepang tetap mempertahankan pengaruhnya dalam politik dan ekonomi regional di bidang komersial dan keamanan. Sedangkan Amerika Serikat

memainkan peranannya sebagai investor, perdagangan bangsa, dan kekuasaan militer.

Dinamika hubungan ekonomi antara keduanya telah mengantarkan mereka pada tujuan bersama dalam menciptakan tatanan dunia baru yang berlandaskan perdamaian dan demokrasi, yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Miyazawa Kiiichi dalam Deklarasi Tokyo dengan tema besar kemitraan global Jepang- Amerika Serikat pada 10 Januari 1992 (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 84). Potensi antara Jepang yang memiliki kapasitas ekonomi yang besar dengan kapabilitas militer Amerika Serikat telah mengarahkan posisi keduanya dalam kemitraan kawasan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) pada integrasi perjanjian perdagangan bebas multilateral *Trans Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2013.